

Bab IV

Revolusi Mesir dan Suriah Serta Perbedaan Sikap Iran Dalam Menanggapi Setiap Revolusi

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai revolusi yang menjadi subyek studi kasus penelitian penulis (revolusi Mesir dan Suriah), kemudian dibahas juga mengenai sikap Iran terhadap masing-masing revolusi diatas dengan tujuan mengetahui sejauhmana Iran mengimplementasikan konsep politik taqiyah dengan cara menganalisis berbagai kepentingan Iran yang nampak maupun tersembunyi dari setiap revolusi dengan menggunakan bantuan teori pembuatan keputusan dan paradigma realis mengenai aktor rasional.

A. Revolusi Mesir dan Sikap Iran terhadap Revolusi

Revolusi Mesir

Revolusi Mesir terjadi setelah pemberontakan rakyat yang dimulai pada tanggal 25 Januari 2011. Pemberontakan ini berbentuk kampanye non-kekerasan, perlawanan sipil yang menampilkan serangkaian demonstrasi, pawai, tindakan pembangkangan sipil dan mogok kerja. Puluhan ribu pengunjuk rasa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dan agama menuntut penggulingan rezim Presiden Mesir Hosni Mubarak. Meskipun sebagian besar aksi pemberontakan berbentuk aksi damai, namun bukan berarti tanpa bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa yangmana setidaknya menewaskan 846 jiwa dan 6.000 orang terluka. Pemberontakan terjadi di Kairo, Alexandria dan kota-kota lain di Mesir. Pemberontakan ini menyusul setelah revolusi Tunisia yang mengakibatkan

penggulingan presiden Tunisia. Pada tanggal 11 Februari, setelah berminggu-minggu protes populer ditentukan dan tekanan, Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya.

Keluhan dari demonstran Mesir difokuskan pada isu-isu hukum dan politik termasuk kebrutalan polisi, hukum darurat negara, tidak adanya pemilu yang jujur dan adil, kebebasan untuk berbicara, korupsi yang tidak terkendali beserta faktor ekonomi termasuk pengangguran yang tinggi, kenaikan harga pangandan rendahnya upah minimum. Namun tuntutan utama dari rakyat yang melakukan demonstrasi adalah menggulingkan rezim Hosni Mubarak dan mencabut hukum darurat dari undang-undang negara.

Mengenai isu politik, rakyat Mesir melihat tindak-tanduk Mubarak yang ingin mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, Gamal Mubarak. Ini telah terlihat semenjak tahun 2000. Isu ini muncul akibat peristiwa meninggalnya Hafez al-Assad, presiden Suriah yang kemudian setelah beberapa jam wafatnya langsung digantikan oleh anaknya, Bashar al-Assad. Ini menyebabkan banyak terjadi perdebatan di Media Mesir tentang prospek terjadinya hal serupa di Mesir yaitu pewarisan tahta kepresidenan. Hal ini terus dibantah oleh Hosni Mubarak dan Gamal, namun pada kenyataannya Hosni Mubarak terus melakukan upaya-upaya yang akan memudahkan Gamal untuk menjadi penggantinya misalnya seperti mengganti konstitusi dan menempatkan Gamal sebagai wakil sekjend partai. Ini menandakan berbagai persiapan yang dilakukan Hosni Mubarak untuk mewariskan kekuasaan untuk anaknya. Inilah salah satu isu politik yang ditentang oleh rakyat Mesir.

Dalam masalah hukum, rakyat menuntut agar hukum darurat (UU No 162 Tahun 1958) dihapus dari konstitusi. Hukum ini mulai diundangkan setelah Perang Enam Hari 1967 kemudian diskors selama 18 bulan di awal 1980-an dan dinyatakan terus berlaku sejak 1981 setelah pembunuhan Presiden Anwar el-Sadat.¹ Undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah dapat memenjarakan orang tanpa batas waktu dan tanpa alasan bila dalam keadaan darurat. Hukum juga membatasi kegiatan politik kelompok non-pemerintah, termasuk demonstrasi jalanan dan sumbangan keuangan yang tidak terdaftar. Pemerintah Mubarak menggunakan alasan ancaman terorisme dalam rangka untuk memperpanjang pemberlakuan hukum darurat. Hal ini telah menyebabkan pemenjaraan aktivis tanpa pengadilan, pencekalan dan pelarangan aktivitas organisasi seperti Ikhwanul Muslimin yang dianggap menentang kebijakan pemerintah, bahkan masjid-masjid, universitas dan surat kabar yang menyuarakan penentangan terhadap pemerintah ikut tercekal hukum darurat. Akibat hal ini Organisasi Hak Asasi Manusia memperkirakan bahwa sampai tahun 2010 tercatat antara 5.000 sampai 10.000 orang berada di penahanan jangka panjang tanpa tuduhan atau pengadilan.

Akibat lain dari diberlakukannya hukum darurat adalah perilaku polisi yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat bahkan terkesan brutal. Menurut sebuah laporan dari Kedutaan Besar AS di Mesir, kebrutalan polisi telah menjadi hal umum dan meluas di Mesir.² Dalam lima tahun terakhir sebelum revolusi,

¹<http://web.archive.org/web/20110201013303/http://en.eohr.org/2008/05/28/%E2%80%9Cegypt-and-the-impact-of-27-years-of-emergency-on-human-rights%E2%80%9D/> diakses pada 31/10/2012

²<http://web.archive.org/web/20110504022032/http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/egypt-police-brutality-torture-wikileaks> diakses pada 31/10/2012

rezim Mubarak membantah adanya penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan oleh polisi. Namun, banyak bukti yang ditunjukkan oleh organisasi lokal dan internasional misalnya melalui video ponsel. Departemen Luar Negeri AS bagian Hak Asasi Manusia tahun 2009 menyatakan bahwa " organisasi hak asasi manusia lokal dan internasional melaporkan bahwa Departemen Dalam Negeri (MOI), Layanan Investigasi Keamanan Negara (SSIS), polisi, dan badan pemerintah lainnya terus menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi dan pengakuan terdakwa. Organisasi Hak Asasi Manusia Mesir mendokumentasikan 30 kasus penyiksaan selama tahun 2009. Selama persidangan diduga bahwa polisi menyiksa mereka selama waktu interogasi. Pada bulan Januari - Februari 2011 ketika terjadi revolusi, brutalitas polisi bertambah tinggi ketika menanggapi protes rakyat. Jack Shenker, seorang reporter *The Guardian*, ditangkap selama protes massal di Kairo pada tanggal 26 Januari 2011. Dia menyaksikan demonstran Mesir disiksa, diserang, dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan oleh polisi. Shenker dan tahanan lainnya dibebaskan setelah salah satu ayah dari seorang tahanan yang terkenal, Ayman Nour, diam-diam turun tangan.³

Sebab lain dari bergejolaknya perlawanan rakyat Mesir adalah kecurangan Mubarak dalam pemilu. Selama 30 tahun Mubarak mengkorupsi suara pemilih pada pemilihan umum (pemilu) dan menjadi kandidat tunggal calon presiden dalam pemilu. Karena kerasnya tuntutan dari kelompok oposisi, sehingga pada tahun 2005 Mubarak membolehkan ada kandidat lain, namun Mubarak tetap saja

³<http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/27/egypt-riot-security-force-action> diakses pada 5/11/2012

mengontrol dan memanipulasi suara sehingga dirinya terpilih kembali menjadi presiden. Dikarenakan banyaknya kecurangan dalam pemilu mengakibatkan jumlah pemilih di Mesir hanya sebanyak 25% saja.

Pada masa pemerintahan Mubarak, pemerintah juga mengekang kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang meskipun konstitusi Mesir memberikan kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (Konstitusi Mesir, Pasal 47-49). Pemerintah sering melakukan penggerebekan rumah, penyiksaan, penangkapan dan mendenda para blogger dan wartawan yang mengkritik pemerintah dengan cara apapun. berlandaskan undang-undang darurat, pemerintah dapat menyensor apa pun jika itu dianggap sebagai ancaman bagi "keamanan publik dan keamanan nasional". Jika ada wartawan atau blogger yang melanggar peraturan diatas dalam bentuk mengkritik pemerintah, mereka bisa saja secara legal akan dihukum denda sebesar 20.000 poundsterling (US \$ 3.650) dan dihukum sampai lima tahun penjara. Forum Moltaqa untuk Pembangunan dan Dialog Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa antara Januari dan Maret 2009, 57 jurnalis dari 13 surat kabar berhadapan dengan hukum karenamengkritik pemerintah mereka. Pemerintah Mesir, Hosni Mubarak memiliki saham di tiga surat kabar harian terbesar di Mesir sehingga dapat mengontrol setiap berita yang diturunkan. Pemerintah juga mengontrol perizinan dan distribusi dari semua kertas di Mesir.⁴ Pemerintah Mesir juga memblokir Internet dengan tujuan menghalangi komunikasi para kelompok oposisi.

⁴<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/nea/136067.htm>diaksespada 5/11/2012

Masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan rakyat Mesir seperti meningkatnya angka kemiskinan, korupsi para pejabat negara, bertambahnya jumlah pengangguran, besarnya lubang kesenjangan antara si miskin dan si kaya dan lain sebagainya.

Selama berlangsungnya revolusi ibukota Mesir, Kairo digambarkan sebagai "zona perang," dan kota pelabuhan, Suez menjadi tempat yang paling sering terjadi bentrokan kekerasan. Pemerintah memberlakukan jam malam karena situasi dianggap telah mencapai titik gawat. Polisi yang notabene loyal kepada Mubarak digantikan oleh pihak militer untuk menjaga keamanan selama masa-masa genting.

Pada akhirnya Mubarak membubarkan pemerintahnya dan menunjuk mantan kepala intelijen Mesir Jenderal Omar Suleiman sebagai Wakil Presiden dalam upaya untuk memadamkan pemberontakan. Mubarak meminta menteri penerbangan dan mantan kepala Angkatan Udara Mesir, Ahmed Shafik, untuk membentuk pemerintahan baru. Di pihak oposisi, Mohamed el-Baradei menjadi tokoh utama oposisi yang bekerjasama dengan semua kelompok oposisi lain yang mendukung perannya sebagai negosiator untuk membentuk pemerintahan transisi. Sebagai tanggapan atas tekanan, Mubarak mengumumkan bahwa ia tidak bermaksud untuk melakukan pemilihan ulang di bulan September 2011.

Karena pemberontakan tidak kunjung padam, Pada tanggal 11 Februari 2011 Wakil Presiden Omar Suleiman mengumumkan bahwa Mubarak akan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan

Tertinggi Angkatan Bersenjata. Pada tanggal 24 Mei 2011, Mubarak diperintahkan untuk diadili atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap demonstran dan jika terbukti bersalah, bisa menghadapi hukuman mati.

Selanjutnya Mesir dipimpin oleh Junta militer, Mohamed Hussein Tantawi. Pada 13 Februari 2011 dia mengumumkan bahwa konstitusi akan dibekukan, kedua majelis parlemen dibubarkan dan militer akan memerintah selama enam bulan hingga pemilu dapat diselenggarakan. Kabinet sebelumnya, termasuk Perdana Menteri Ahmed Shafik, akan terus bertugas sebagai pemerintah sementara sampai yang baru terbentuk. Shafik mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret, sehari sebelum protes besar yang telah direncanakan untuk memintanya mundur. Dia digantikan oleh Essam Sharaf, mantan menteri transportasi.⁵

Setelah Mubarak mengundurkan diri, protes di Mesir terus berlanjut. Pada tanggal 8 April 2011, puluhan ribu demonstran memenuhi Tahrir Square, menuntut pengunduran diri dengan segera para tokoh mantan rezim Mubarak, serta memecat penuntut umum Mesir, karena lambatnya dalam penyelidikan mantan pejabat yang korup. Pada bulan Juli 2011, ratusan ribu demonstran berkumpul di Suez, Alexandria dan Tahrir Square di Kairo. Mereka menuntut reformasi pemerintahan secara langsung dan memecat semua mantan pejabat dari rezim yang digulingkan.

⁵<http://www.forexyard.com/en/news/Egypt-prime-minister-quits-new-govt-soon-army-2011-03-03T093300Z> diakses pada 5/11/2012

Pada November 2011, demonstrasi terbesar di Mesir sejak pengunduran diri Hosni Mubarak berlangsung. Mulai 19 hingga 21 November, bentrokan meletus antara demonstran anti SCAF dan pasukan keamanan. Sebagai hasilnya demonstran berhasil menduduki alun-alun. Pecah pertempuran sengit. Polisi memukuli demonstran, menembak dan menggunakan gas air mata pada mereka. Pada tanggal 24 November 2011, bentrokan mulai mereda, SCAF mengeluarkan permintaan maaf resmi atas kematian sekitar 40 demonstran. Pada tanggal 25 November 2011, pemerintah AS mengkritik SCAF yang menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan junta militer Mesir untuk mengakhiri kekerasan terhadap tahanan dan kekuasaan akan dialihkan ke pemerintahan sipil sesegera mungkin. Pada tanggal 16 Desember 2011, demonstran menuntut pengalihan kekuasaan kepada pemerintahan sipil dipercepat dan sekali lagi terjadi bentrok dengan aparat keamanan di pusat kota Kairo.

Pada tanggal 2 Juni 2012, Hosni Mubarak dinyatakan bersalah karena terlibat dalam pembunuhan para demonstran dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Para demonstran marah karena banyak dari pengikut Mubarak yang dibiarkan bebas termasuk dua anak Mubarak. Para demonstran meneriakkan "rakyat ingin membersihkan pengadilan!". Pada tanggal 19 Juni, demonstran yang kebanyakan berasal dari kelompok melakukan protes di Tahrir square Kairo. Mereka marah karena SCAF telah mengambil alih beberapa kekuasaan yang sebelumnya milik Presiden. Para pengunjuk rasa juga menuduh SCAF melancarkan kudeta. Pada tanggal 24 Juni, setelah sebelumnya pada 16 dan 17

Juni 2012 dilakukan pemilihan presiden, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Negara bahwa Muhammad Morsi telah memenangkan pemilihan presiden. Pada tanggal 30 Juni 2012, Morsi diresmikan sebagai Presiden ke-5 Mesir.

Sikap Iran Terhadap Revolusi Mesir

Ketika Revolusi di Mesir meletus, pemerintah Iran sangat antusias dan memberi dukungan positif. Iran melihat bahwa terjadinya revolusi Mesir merupakan kelanjutan dan keberhasilan dari program ekspor revolusi yang dicanangkan oleh Ayatullah Khomeini. Saat Shalat Jumat di Teheran pada 4 Februari 2011, Ayatullah Khamenei menyatakan bahwa revolusi di Mesir adalah kelanjutan dari Revolusi 1979 di Iran dan dia menyerukan para ulama Mesir untuk ikut berperan di dalamnya. Dia berargumen bahwa motivasi utama untuk revolusi rakyat Tunisia dan Mesir adalah karena kekecewaan rakyat terhadap pemimpin negara yang menjadi antek-antek Amerika Serikat dan Israel.

Sebagaimana diketahui secara luas bahwa hubungan Iran dan Mesir telah terputus semenjak tahun 1979, ketika Ayatullah Khomeini menentang keras keputusan Anwar el-Sadat, presiden Mesir saat itu yang menyetujui perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel melalui perjanjian Camp David. Khomeini menganggap hal tersebut sebagai bentuk tunduknya Mesir terhadap Israel yang notabene adalah kolonialis yang menjajah dan merebut tanah rakyat palestina.

Berhasilnya rakyat mesir menumbangkan rezim Hosni Mubarak yang selama masa pemerintahannya menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat di

Timur Tengah menjadi angin segar bagi terbinanya hubungan baru antara Iran dan Mesir. Iran yang terkenal sangat menentang Israel dan Amerika berharap pemerintahan Mesir yang baru bisa menjadi partner dalam melawan dominasi Amerika dan Israel.

Bila dianalisis dengan menggunakan konsep politik Syi'ah khususnya konsep politik taqiyah, kebijakan Iran mendukung revolusi Mesir tidak hanya disebabkan oleh kebencian Iran terhadap rezim Mubarak. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh Iran dari keputusannya mendukung revolusi rakyat.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kepentingan Iran dalam dukungannya terhadap revolusi rakyat Mesir, perlu kiranya penulis jelaskan kembali secara singkat tentang konsep politik taqiyah. Konsep politik taqiyah sebenarnya bukan hal yang baru dalam kamus politik Syi'ah yang menjadi mazhab utama yang dianut Iran. Jika pada awalnya konsep taqiyah hanya digunakan dalam konotasi menyembunyikan ke-Syi'ahan dengan tujuan terhindar dari perilaku jahat para musuh Syi'ah, kini taqiyah telah menjalar kedalam berbagai ranah kehidupan sosial dan politik Syi'ah. Bahkan taqiyah yang merupakan salah satu pilar Syi'ah Imamiyah ini telah diartikan menjadi kata diplomasi. Dalam buku antologi Islam disebutkan:

“definisi yang lebih baik dan lebih tepat dari kata ‘taqiyah’ adalah ‘diplomasi’. Makna taqiyah sesungguhnya lebih terwujud dalam sebuah kata ‘diplomasi’.

Karena kata ini mencakup spektrum perilaku yang luas yang dapat digunakan lebih jauh oleh pihak yang berkepentingan”⁶

Tujuan utama dari adanya konsep taqiyah adalah untuk menjaga eksistensi kaum Syi’ah yang sejak dulu mengalami kekalahan politik sehingga sering mendapat perlakuan yang semena-mena dari para musuhnya baik orang kafir maupun orang muslim yang zalim dan membenci Syi’ah.

Pada saat ini taqiyah bisa bertujuan untuk menyembunyikan kepentingan nasional dan kelompok dengan cara menampakkan persetujuan terhadap sesuatu di suatu tempat sedangkan ditempat lain menampakkan penentangan atau dengan bahasa lain menerapkan “standar ganda”. Persetujuan atau penentangan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang mempraktekkan taqiyah.

Kembali kepada dukungan Iran terhadap revolusi rakyat Mesir, Iran yang selama tiga dekade mempunyai hubungan tidak baik dengan penguasa Mesir merasa mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan revolusi rakyat Mesir. Kepentingan-kepentingan itu mungkin saja tidak terucap secara eksplisit karena Iran sedang mengimplementasikan konsep taqiyah yang berusaha menyembunyikan kepentingannya dan menampakkan kerjasama walaupun dengan pihak yang berlawanan mazhab dengannya, mazhab Sunni yang merupakan mazhab rakyat Mesir, namun kepentingan itu bisa dianalisis dengan teori pembuatan keputusan dan paradigma realis tentang aktor rasional.

⁶ Tim Digital Library Project, *Antologi Islam: Risalah Islam Tematis dari Keluarga Nabi*. Al-Huda. 2012. Hal :743

Menurut teori pembuatan keputusan (*decision making theory*) bahwa sebuah keputusan atau kebijakan dihasilkan melalui gabungan dari kegiatan penerimaan *input*, interpretasi *input* dan menterjemahkannya ke dalam *output* yang berupa keputusan. Jadi bila dikaitkan dengan revolusi rakyat mesir maka kita dapatkan beberapa input dari dari keputusan Iran mendukung revolusi rakyat Mesir. *Pertama*, Mesir selama ini dipimpin oleh seorang diktator sekaligus antek Amerika. Iran semenjak revolusi 1979 menyatakan penentangan keras terhadap pemimpin yang diktator dan apalagi pendukung Amerika dan Israel. *Kedua*, Ikhwanul Muslimin, sebagai organisasi islam terbesar di Mesir diharapkan menjadi partner yang akan menyokong Hamas dan Hizbullah dalam menghadapi Israel. *Ketiga*, revolusi Mesir sebagai bentuk keberhasilan Iran mengekspor revolusi. *Keempat*, apabila rezim Mubarak hengkang maka diharapkan muncul pemimpin baru yang bukan merupakan antek Amerika.

Dari keempat *input* diatas dapat diinterpretasikan bahwa Iran seharusnya mendukung revolusi rakyat Mesir jika ingin mendapatkan manfaat seperti: salah satu musuh bebuyutan Iran tersingkirkan dan pengaruh Amerika di Mesir dapat berkurang karena pemimpin yang selama ini menjadi kepanjangan tangan Amerika telah digulingkan dari kursi kekuasaan, adanya jalinan kerjasama dengan kelompok ikhwanul muslimin yang meskipun bermazhab Sunni namun nantinya bisa diharapkan secara bersama membantu kelompok Hamas dan Hizbullah melawan negara Israel. Selama ini Ikhwanul Muslimin juga dikenal sangat anti terhadap Amerika dan Israel.

Manfaat lain yang bisa didapatkan Iran adalah memperkuat eksistensinya di mata dunia khususnya negara Timur Tengah dan dunia Islam karena ekspor revolusi yang dicita-citakan Khomeini berhasil. Dan yang keuntungan terakhir yang bisa Iran dapatkan adalah Iran mempunyai harapan untuk bisa kembali menjalin hubungan bilateral dengan Mesir yang selama tiga dekade terputus.

Penggabungan input dan interpretasi input diatas membuat Iran memilih keputusan untuk mendukung revolusi rakyat Mesir.

Tabel 4.1. Proses pengambilan keputusan Iran terhadap revolusi Mesir

Input	Interpretasi input	Keputusan
Pemimpin yang diktator dan antek Amerika	Satu musuh tersingkirkan	Mendukung revolusi rakyat Mesir
Ikhwanul Muslimin sebagai partner pendukung Hamas dan Hizbullah	Kerjasama dengan kelompok terbesar di Mesir	
Keberhasilan ekspor revolusi Iran	Memperkuat eksistensi Iran	
Pemimpin baru Mesir	Harapan terjalin kerjasama dalam segala bidang	

Jika ditilik dari kacamata paradigma realis mengenai aktor rasional, Iran sebagai sebuah negara telah memperhitungkan secara rasional mengenai keuntungan dan kerugian dari mendukung atau menolak revolusi, khususnya dalam hal keamanan nasional. Mengenai manfaat atau keuntungan yang didapatkan Iran jika mendukung revolusi telah kami ulas diatas. Adapun mengenai kerugian yang kira-kira didapatkan Iran dari dukungannya terhadap revolusi adalah bertambahnya eskalasi permusuhannya dengan Amerika dan

sekutunya yang mengakibatkan embargo ekonomi dan militer akan terus dijalani oleh Iran. Namun hal ini tidak mengkhawatirkan Iran yang terkenal berani menentang Amerika dan para sekutunya.

Pada kasus revolusi Mesir Iran benar-benar sedang mengimplementasikan taqiyah. Iran bertaqiyah atau (berpura-pura) mendukung rakyat Mesir yang mayoritas Sunni dengan kata-kata manis namun tidak terlihat sama sekali tindakan nyata yang dilakukan Iran secara langsung guna membantu aksi rakyat Mesir. Iran hanya menginginkan berbagai keuntungan dari keberhasilan revolusi Mesir sebagai pemenuhan hasrat kepentingan nasional seperti yang penulis sebut di atas.

B. Revolusi Suriah dan Sikap Iran terhadap Revolusi

Revolusi Suriah

Revolusi Suriah adalah konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Suriah antara pasukan yang setia kepada pemerintah Partai Ba'ath dan mereka yang ingin menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Konflik dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 dengan adanya demonstrasi nasional sebagai bagian dari gerakan protes yang lebih luas dikenal sebagai Arab Spring. Para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, serta mengakhiri hampir lima dasawarsa kekuasaan Partai *Ba'ath*.⁷

Pada bulan April 2011, Tentara Suriah dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan dan tentara diperintahkan untuk menembaki warga sipil. Setelah

⁷http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war diakses pada 31/10/2012

berbulan-bulan pengepungan militer, protes berkembang menjadi pemberontakan bersenjata. Pasukan oposisi, terdiri dari tentara yang membelot dan relawan sipil. Mereka menjadi semakin kuat dan mulai terorganisir karena mereka disatukan dalam kelompok yang lebih besar, dengan beberapa kelompok yang menerima bantuan militer dari beberapa negara asing. Pemerintah Suriah menamakan para pemberontak sebagai "kelompok teroris bersenjata."

Faktor penyebab dari meletusnya revolusi di Suriah dapat di kategorikan menjadi 3 macam: masalah keagamaan, pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial ekonomi. Mengenai masalah keagamaan, *mafhum* bahwa para keluarga Assad (pemegang kekuasaan di Suriah) berasal dari kaum minoritas sekte Alawit, sebuah cabang dari Islam Syi'ah yang diperkirakan hanya terdiri dari 12 persen dari populasi rakyat Suriah.⁸ Hal ini telah menimbulkan kecemburuan dari kelompok Muslim Sunni, sebuah sekte yang berjumlah sekitar tiga perempat dari populasi rakyat Suriah. Minoritas Kurdi juga melakukan protes dan keluhan. Ketika pemberontakan dimulai, Bouthaina Shaaban, seorang penasihat presiden, menyalahkan ulama Sunni dan pengkhotbah yang menghasut rakyat Sunni untuk memberontak, seperti yang dilakukan Yusuf al-Qaradawi dalam sebuah khotbah di Doha pada 25 Maret.⁹ Pemerintah Suriah mengandalkan tentara yang mayoritas menganut sekte Alawit untuk memerangi pemberontakan. Adik Bashar al-Assad, Maher al-Assad diberi kekuasaan memimpin tentara Divisi Lapis Baja Keempat dan saudara iparnya, Assef Shawkat, adalah wakil menteri pertahanan. Karena

⁸ <http://www.reuters.com/article/2011/12/23/us-syria-religion-alawites-idUSTRE7BM1J220111223> diakses pada 5/11/2012

⁹ <http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/27/report-12-killed-syrian-port-city> diakses pada 5/11/2012

pemerintah didominasi oleh sekte Alawit, maka itu menyebabkan mayoritas sekte Sunni dan minoritas lainnya melakukan perlawanan dalam rangka merebut kekuasaan.

Untuk masalah hak asasi manusia, Keadaan HAM di Suriah telah lama menjadi subyek kritik keras dari organisasi global. Suriah berada di bawah pemerintahan darurat sejak 1963 hingga 2011, ini menyebabkan pemerintah secara efektif memberikan pasukan keamanan kekuasaan besar untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Pemerintah Suriah berjustifikasi dengan menunjuk pada fakta bahwa negara dalam keadaan terus-menerus berperang dengan Israel .

Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1970, Hafez al-Assad menyingkirkan setiap lawan politiknya dan menegaskan kekuasaannya atas semua aspek kehidupan rakyat Suriah. Hafez sangat senang mengkultuskan diri dan memberikan tekanan keras bagi para oposisi. Setelah kematiannya pada tahun 2000 dan dia digantikan oleh anaknya, Bashar al-Assad untuk menduduki kursi kepresidenan. Banyak harapan dengan memerintahnya Bashar, pemerintah Suriah akan mengembangkan masyarakat yang lebih liberal. Periode ini dikenal sebagai Musim Semi Damaskus. Namun faktanya, al-Assad secara luas dianggap telah gagal dalam melaksanakan perubahan demokrasi. Pada tahun 2010 *Human Rights Watch* menyatakan bahwa ia telah gagal untuk memperbaiki permasalahan hak asasi manusia sejak memegang kekuasaan sepuluh tahun

sebelumnya.¹⁰ Semula lawan politiknya tetap dilarang, sehingga membuat Suriah menjadi negara satu-partai tanpa pemilu yang bebas.

Hak berekspresi, berserikat dan berkumpul secara ketat dikontrol di Suriah. Pihak berwenang melecehkan dan memenjarakan aktivis hak asasi manusia dan orang yang mengkritik pemerintah. Mereka yang ditangkap seringkali ditahan tanpa waktu penahanan yang jelas dan disiksa dalam kondisi penjara yang buruk. Website seperti Amazon, Facebook, Wikipedia dan YouTube diblokir sampai 1 Januari 2011.

Perempuan dan etnis minoritas menghadapi diskriminasi di sektor publik. Ribuan Kurdi Suriah yang ditolak kewarganegaraannya pada tahun 1962 dan keturunan mereka terus diberi label sebagai "orang asing" sampai 2011. Pada tanggal 6 April 120.000 dari sekitar 200.000 warga Kurdi yang tidak memiliki kewarganegaraan diberikan kewarganegaraan.¹¹ Beberapa kerusuhan mendorong terjadinya peningkatan ketegangan di daerah Kurdi Suriah sejak tahun 2004. Pada tahun itu, kerusuhan pecah melawan pemerintah di kota timur laut Qamishli. Terjadi juga kekacauan selama pertandingan sepak bola, beberapa orang mengangkat bendera Kurdi dan pertandingan berubah menjadi konflik politik. Dalam kekacauan itu bentrokan terjadi antara kelompok Kurdi dan kelompok Arab, akibatnya setidaknya 30 orang tewas, namun beberapa klaim menunjukkan jumlah korban sekitar 100 orang.

¹⁰<http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/16/syrian-human-rights-unchanged-assad> diakses pada 31/10/2012

¹¹http://articles.cnn.com/2011-04-07/world/syria.kurdish.citizenship_1_kurdish-region-kurdish-identity-stateless-kurds?_s=PM:WORLD diakses pada 5/11/2012

Bila dilihat secara sosial ekonomi, oposisi terhadap pemerintah itu lebih banyak berasal dari daerah atau kota miskin. Kota-kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti Daraa dan Homs di wilayah pedesaannya mengalami kekeringan di awal tahun 2011. Ketimpangan sosial ekonomi meningkat secara signifikan setelah kebijakan pasar bebas yang diprakarsai oleh Hafez Assad pada akhir periode kekuasaannya dan dilanjutkan pada masa pemerintahan Bashar Assad. Karena kebijakan ini lebih menekankan pada sektor jasa, sehingga hanya menguntungkan kelompok orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintah dan para pedagang yang memiliki modal besar yang kebanyakan berasal dari Damaskus dan Aleppo, dua kota terbesar di Suriah. Keadaan sosial ekonomi terus memburuk dikarenakan standar hidup di Suriah yang terus meningkat dan harga komoditas yang juga naik tajam. Suriah juga menghadapi permasalahan tingginya tingkat pengangguran.

Akibat dari banyaknya permasalahan di atas, maka pecahlah aksi pemberontakan oleh rakyat Suriah pada 15 Maret 2011 dan sampai saat ini keadaan di Suriah masih mencekam. Kelompok-kelompok yang memberontak semakin banyak sehingga pemerintah Suriah mengerahkan kekuatan militer yang maksimal untuk melawan para pemberontak. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korban jiwa dan luka-luka akibat konflik ini bertambah banyak. Diperkirakan korban jiwa telah mencapai puluhan ribu jiwa.

PBB telah melakukan upaya perdamaian di Suriah dengan mengirimkan mantan sekjend PBB, Kofi Annan sebagai penengah. Namun usaha itu gagal

karena rencana Annan yang menginginkan terjadinya gencatan senjata di Suriah ditolak oleh sebagian negara yang memiliki hak veto seperti China dan Rusia. Setelah gagalnya Annan, PBB kembali mengirimkan utusan perdamaian, Lakhdar Ibrahimi, orang yang pernah mendapatkan nobel perdamaian untuk kembali menengahi konflik antara rakyat dan pemerintah di Suriah. Lagi-lagi usaha itu gagal karena kedua belah pihak yang berkonflik sama-sama bersikeras untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.

Bukan hanya PBB yang turun tangan dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Organisasi Islam seperti OKI telah membekukan keanggotaan Suriah dalam KTT di Makkah sebagai bentuk tekanan terhadap kedua belah pihak yang bertikai di Suriah.¹² Hal ini tidak membuat pemerintah Suriah bergeming dan bahkan terus memerangi rakyat dengan yang memberontak dengan persenjataan lengkap.

Berbagai reaksi ditunjukkan oleh dunia internasional terhadap konflik di Suriah. Ada yang mendukung pemerintah dan ada pula yang mendukung rakyat yang memberontak. Negara yang mendukung pemerintah (rezim Assad) adalah Iran, Rusia dan Cina. Namun karena melihat tindakan anarkis yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat, Rusia dan Cina sedikit melonggarkan dukungannya terhadap rezim Assad dan meminta agar dilakukan upaya perdamaian dengan tidak mengedepankan perlawanan militer. Namun Iran tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan bahkan Iran dikabarkan mengirim

¹²<http://news.fimadani.com/read/2012/08/14/keanggotaan-suriah-dibekukan-ok-i-dalam-ktt-di-mekkah/> diakses pada 5/11/2012

bantuan persenjataan dan tentara untuk membantu pemerintah Suriah melawan pemberontak.

Arab Saudi, Qatar dan Turki adalah termasuk negara yang sangat menentang aksi pemerintah Suriah dan sebaliknya mendukung rakyat yang memberontak. Para Syeikh dan jutawan dari negara-negara kaya tersebut mengirimkan bantuan ekonomi bahkan militer untuk membantu rakyat Suriah.

Melihat komposisi antara negara yang mendukung dan yang menentang revolusi Suriah, beberapa analis telah menafsirkan konflik Suriah sebagai bagian dari perang tanding regional antara negara Sunni, seperti, Arab Saudi, Qatar dan Turki yang mendukung oposisi yang dipimpin oleh kelompok Sunni dan Iran dan Hizbullah, yang mendukung pemerintah Alawit Syi'ah di Suriah.

Sikap Iran Terhadap Revolusi Suriah

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada bab 2 ketika membahas hubungan Iran dan Suriah, kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat erat dan hampir dipastikan oleh banyak analis bahwa hubungan baik keduanya akan abadi dengan melihat dari kesamaan visi dan kepentingan dari keduanya.

Hubungan erat ini terutama disebabkan oleh kesamaan mazhab yang dianut oleh Iran dan rezim pemerintah Suriah yaitu mazhab Syi'ah. Iran mengkhawatirkan banyak hal bila saja revolusi berhasil, khususnya yang dikhawatirkan Iran adalah eksistensi rakyat Syi'ah Suriah. Apabila revolusi berhasil maka secara otomatis dan besar kemungkinan yang akan memimpin Suriah selanjutnya adalah kaum

Sunni yang merupakan mayoritas di Suriah dan mereka didukung oleh negara-negara Sunni seperti Saudi Arabia, Qatar dan Turki. Terlebih lagi Saudi merupakan sekutu Amerika Serikat di Timur tengah sehingga apabila revolusi berhasil ditakutkan dominasi Amerika Serikat akan bertambah di Timur Tengah dan ini menjadi ancaman besar bagi Iran yang selama ini sangat menentang Amerika.

Satu-satunya cara yang bisa dilakukan Iran adalah mendukung pemerintah Suriah yang diktator, yang meskipun harus menyalahi nilai yang selama ini Iran elu-elukan yaitu sangat menentang segala bentuk kediktatoran penguasa sebagaimana cita-cita revolusi 1979. Iran juga menyalahi sistem politik luar negerinya sendiri yangmana dulunya digagas oleh pemimpin revolusi Islam Ayatullah Khomeini, yaitu "*independence, freedom and Islamic Republic*".¹³ Iran seakan tidak lagi memegang nilai *independence* karena telah berpihak secara membabi buta terhadap pemerintah yang diktator dan menentang nilai kebebasan.

Penulis melihat kebijakan yang diambil Iran untuk membela pemerintah Suriah adalah bentuk lain dari implementasi konsep politik taqiyah yang bertujuan untuk menjaga eksistensi dan kepentingan Syi'ah di Suriah. Iran sebagai pusat Syi'ah di dunia merasa memiliki tanggung jawab untuk membela kaum Syi'ah dimanapun mereka berada.

¹³R.K Ramazani dalam *Iran's Foreign Policy "from Khatami to Ahmadi Nejad"*, Ithacha Press. UK: 2008, hal:1

Disamping kepentingan menjaga eksistensi Syi'ah di Suriah, mungkin saja Iran juga memiliki kepentingan tersendiri dari kebijakan mendukung rezim pemerintah dan menolak revolusi. Untuk lebih dalam mengetahui kepentingan Iran dan sebab-sebab Iran menolak revolusi, penulis menggunakan teori pembuatan keputusan (*decision making teory*) yangmana menggabungkan *input* dan interpretasi *input* dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan.

Ada beberapa input yang menjadi patokan Iran mengambil keputusan menentang revolusi dan mendukung pemerintah Suriah. Pertama, Suriah adalah kawan lama dan sekutu Iran. Kedua, pemimpin Iran dari golongan Syi'ah sedangkan para pemberontak dari golongan Sunni. Ketiga, ikut campurnya pihak asing dalam penyelesaian konflik Suriah.

Dari tiga *input* di atas, kemudian diinterpretasikan bahwa Iran harus melindungi dan mendukung pemerintah Suriah jika tidak ingin kehilangan sekutu yang loyal. Jatuhnya rezim Assad akan membawa kerugian bagi Iran karena selama ini Suriah di bawah kepemimpinan rezim Assad selalu mendukung segala upaya yang dilakukan Iran meskipun dunia Internasional mengecamnya. Suriah juga bisa menjadi sekutu dalam perang jika ada negara lain yang ingin berperang dengan Iran sebagaimana dahulu Suriah menjadi sekutu Iran dalam perang Irak-Iran. Suriah juga menjadi kawan yang membantu Iran melawan dominasi Israel di Timur tengah dengan sama-sama membantu perlawanan Hizbullah dan Hamas terhadap Israel.

Interpretasi *input* selanjutnya menunjukkan kemungkinan jika pemberontak berhasil menggulingkan rezim Assad maka yang akan berkuasa di Suriah selanjutnya adalah rezim Sunni dan hal tersebut akan berdampak tidak baik bagi eksistensi kaum Syi'ah di Suriah. Sebagaimana diketahui bahwa Sunni dan Syi'ah mengalami kesulitan dalam melakukan kerjasama dan bersatu dikarenakan adanya saling ketidakpercayaan antara satu dengan yang lainnya. Maka jika Iran tetap menginginkan Syi'ah memiliki dominasi di Suriah, sudah menjadi keharusan untuk membela pemerintah Suriah dan menentang revolusi rakyat.

Yang terakhir, konflik Suriah kini sudah tidak menjadi konflik antara rakyat dan pemerintahnya saja, akan tetapi telah banyak campur tangan dari negara-negara lain yang juga mempunyai kepentingan di Suriah. Contohnya Saudi Arabiah, Qatar, Turki, Amerika Serikat dan para sekutunya telah banyak melakukan campur tangan baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Mereka juga seakan memiliki kepentingan tersembunyi dari upaya perdamaian dan bantuan yang mereka berikan. Bahkan ada negara yang secara terang-terangan memberi dukungan terhadap pihak pemberontak berupa bantuan ekonomi dan militer. Ini menjadikan Iran tidak tinggal diam namun harus mengambil sikap sebaliknya, yaitu mendukung pihak pemerintah melawan para pemberontak.

Dari penggabungan *input* dan interpretasi *input* di atas, menjadi jelas pilihan kebijakan atau keputusan apa yang harus diambil oleh Iran yaitu mendukung pemerintah Suriah dan menentang revolusi.

Tabel 4.2. Proses pengambilan keputusan Iran terhadap revolusi Suriah

Input	Interpretasi input	Output/kebijakan
Suriah adalah sekutu abadi	Jika rezim Suriah berganti membawa kerugian bagi Iran	Mendukung pemerintah dan menentang revolusi
Pemerintah Syi'ah VS pemberontak Sunni	Eksistensi Syi'ah terancam	
Adanya campur tangan asing	Banyak kepentingan asing dalam konflik Suriah	

Dari sudut pandang paradigmarealis, Iran adalah aktor rasional yang telah memilah dan memilih setiap keputusan yang diambilnya khususnya dalam hal keamanan. Dengan tetap membela rezim Assad agar tidak digulingkan oleh kelompok Sunni yang memberontak maka Iran masih memiliki sekutu yang kuat dalam bidang militer karena Suriah juga merupakan negara yang memiliki kemampuan militer yang modern dan kuat didukung lagi oleh bantuan dari kekuatan Hizbullah yang selama ini disokong secara bersama dengan Iran.

Dalam kasus revolusi Suriah, Iran tidak mengimplementasikan taqiyah secara total sebagaimana dilakukan ketika mendukung revolusi Mesir. Bentuk sikap yang penulis anggap bagian dari taqiyah Iran dalam kasus revolusi Suriah adalah sikap penentangan Iran terhadap revolusi padahal Iran selalu membanggakan diri sebagai pelopor revolusi di dunia Islam. Disamping itu Iran juga rela menyalahi sistem politik luar negerinya sendiri yaitu "independen dan bebas". Sehingga akhirnya Iran harus bermuka dua, mendukung revolusi tatkala rezim yang hendak digulingkan adalah musuh Iran dan menentang revolusi jika rezim yang berkuasa adalah sekutu Iran.